

MENGUKIR SEDERET PRESTASI EMAS

Kursi PSM dan PSSI Terus Digoyang

Upaya ‘menghabisi’ karir Nurdin Halid tidak hanya di koperasi dan politik tetapi juga di sepakbola. Posisinya di PSM Makassar terus digoyang meski sederet prestasi emas telah dipersembahkannya untuk Tim Juku Eja. Terjangan badai selalu menghantam langkah Nurdin mencetak karya-karya besar bernilai sejarah selama 8 tahun menahkodai PSSI.

LAMBUNGAN PRESTASI PSM NURDIN MALAH DIKECAM

Upaya menjegal karir Nurdin Halid sudah terlihat sejak menjadi manajer PSM Makassar. Sukses mengantar Tim Juku Eja ke final Liga Indonesia 1995/1996, Nurdin dikecam lantaran mengontrak pemain asing dan pemain lokal dari luar Sulsel dengan alasan kebijakan itu mematikan pembinaan pemain lokal. Padahal, menurut Nurdin, PSM sebagai klub profesional di era Liga Indonesia dituntut berkualitas tinggi sehingga bisa bertahan di kompetisi tertinggi di Tanah Air.



Nurdin Halid, manajer PSM Makassar disambut kedatangannya oleh pendukung fanatik Tim Juku Eja setelah sukses menembus grandfinal Liga Indonesia musim 1995/1996.

“Kita butuh pemain asing dan pemain lokal non-Sulsel berkualitas agar bisa bersaing dan eksis di Liga Indonesia. Prestasi tinggi justru akan mendatangkan kebang-gaan bagi warga Sulsel dan pada saat yang sama memacu pemain muda Sulsel untuk berkompetisi untuk masuk skuad PSM. Itu logika kompetisi,” Nurdin menegaskan sikapnya.

Nurdin Halid berencana mundur, apalagi sudah ada ‘gerakan’ pihak lawan politik di Sulsel yang tidak ingin popularitasnya kian melejit. Sebelum menahkodai PSM, nama Nurdin sudah menjadi buah bibir berkat tangan dinginnya membesarkan Puskud Hasanuddin dan keberhasilan Nurdin Halid

menduduki posisi ketua AMPI Sulsel. Sukses mengantar PSM ke Senayan di musim pertama, popularitas Nurdin tak terbendung.

Nurdin Halid akhirnya urung mundur karena banyak pihak justru mendesak dan ‘merayunya’ agar tetap mengomandoi PSM. Namun, Nurdin Halid memutuskan mundur di akhir musim 1996/1997 karena situasinya sudah tidak kondusif lagi. Tiga tahun kemudian, Nurdin Halid kembali menerima desakan masyarakat Sulsel untuk menangani Tim Juku Eja.

Di tangan Nurdin, PSM meraih gelar juara Liga Indonesia musim 2000/2001. Bahkan, mengantar PSM melaju ke babak 8 besar Liga Champions Asia dan Kota Makassar sebagai tuan rumah perempat final. Prestasi emas Tim Juku Eja membuat popularitas Nurdin Halid melambung tinggi. Namun, hal ini membuat lawan-lawan politik makin gerah. Situasi yang makin tidak kondusif membuat Nurdin akhirnya benar-benar meninggalkan posisinya di PSM Makassar maupun Ketua Komda PSSI Sulawesi Selatan.

MENAHKODAI PSSI NURDIN MENANTANG BADAI

Upaya menjegal Nurdin Halid menduduki kursi ketua umum PSSI sudah tampak tatkala ia maju sebagai salah satu calon ketua umum dalam Kongres PSSI tahun 2003 di Jakarta. Sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba saja menggelar demonstrasi menolak pencalonan Nurdin di bundaran Hotel Indonesia, tempat digelarnya Kongres.

Namun, langkah Nurdin Halid menduduki kursi nomor satu PSSI tak terbendung berkat prestasi dan reputasinya sebagai manajer PSM Makassar, Ketua Komda PSSI Sulawesi Selatan, manajer Pelita Jaya Jakarta, dan Ketua Bidang Prestasi PSSI era kepemimpinan Agum Gumelar.

‘Lawan politik’ sepertinya tidak ingin Nurdin Halid terus mengukir prestasi emas di PSSI. Betapa tidak, Nurdin sukses menaikkan standar organisasi

PSSI, profesionalisme klub dan kompetisi sepakbola Indonesia ke level standar internasional (*FIFA/AFC standard*) dan menduniakan Indonesia melalui sepak-bola, terutama menggelar putaran final Piala Asia di Jakarta dan Palembang, serta Indonesia calon resmi Piala Dunia 2022 FIFA.



Nurdin Halid, menyampaikan pidato kemenangan usai terpilih menjadi ketua umum PSSI 2003-2007 dalam Kongres PSSI pada 19 Oktober 2003 di Hotel Indonesia, Jakarta.

Lompatan pencapaian demi pencapaian bersejarah yang diukir Nurdin Halid membuat iri lawan politik, termasuk pemegang kekuasaan saat itu. Tak heran, ketika Nurdin terseret kasus hukum tahun 2005, berbagai jurus terus 'ditembakkan' agar Nurdin mundur dari kursi ketua umum PSSI.

Namun, semua itu tidak menggetarkan Nurdin. Nurdin menolak mundur karena dua hal. Pertama, sesuai Statuta PSSI, tidak ada permintaan 2/3 anggota PSSI untuk menggelar Munaslub pergantian dirinya. Kedua, desakan mundur datang dari 'kekuatan luar' yang ingin menyingkirkannya, lalu menguasai PSSI.

"Setiap saat saya siap mengundurkan diri kalau anggota PSSI menghendaki. Sebagai ketua umum, saya harus bertahan demi menjaga 'Konstitusi' Statuta PSSI sebagai marwah organisasi sepakbola di bawah naungan FIFA. Jika dibiarkan, ke depan PSSI gampang sekali diintervensi pihak luar. Intervensi pihak luar justru sangat tabu di mata FIFA," tegas Nurdin.

PALANG PINTU MELAWAN "POLITISI" SEPAKBOLA

Gagal melengserkan Nurdin dari singgasana PSSI, sebuah jurus serang agak 'kasar' kembali menghantam Nurdin. Di tengah euforia masyarakat masih memperbincangkan kehebatan Indonesia di Piala Asia, tiba-tiba saja palu MA dijatuhkan atas Nurdin. Bak petir di siang bolong, pada tanggal 13 September 2007 MA menjatuhkan kasasi kasus minyak goreng yang sudah 'mengendap' dua tahun lebih.

Sebuah putusan yang kental bernuansa politis. Betapa tidak, putusan kasasi itu dijatuhkan dua tahun tiga bulan setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 28 Juni 2005.

Dugaan berbau politis itu menguat karena putusan tersebut dijatuhkan bertepatan dengan pelantikan Nurdin Halid menjadi anggota DPR RI (Fraksi Golkar) pada 13 September 2007 melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan Andi Mattalata yang diangkat menjadi Menteri Hukum dan HAM.

Ditengah menjalani hukuman yang kedua kalinya itu, kepemimpinan Nurdin Halid di PSSI kembali di goyang. Nurdin Halid didesak mundur. Namun dukungan kepada Nurdin Halid di lingkungan PSSI masih kuat, terutama dari Komite Eksekutif PSSI dan para anggota pemilik suara. Nurdin Halid mengisahkan:

"Tekanan melalui pemberitaan pers yang tidak obyektif dan seimbang sungguh luar biasa. Tapi, mengapa saya tak bergeming? Karena saya menjaga harkat dan martabat PSSI. Saya bertahan demi marwah organisasi. Ketika organisasi PSSI diobok-obok oleh pihak lain di luar PSSI, siapa yang harus membelanya? Apakah di masa depan, ketua umum PSSI mau ditentukan oleh desakan orang, opini pers, atau demonstrasi? FIFA dengan tegas menjawab: Tidak! Semua berada di tangan Anggota PSSI."



Nurdin Halid, selaku Ketua Umum PSSI bersama Komite Eksekutif PSSI 2007-2011.

Statuta FIFA melarang keras intervensi dari kepentingan, kekuasaan, dan kewenangan dari pemerintah, organisasi politik, atau kelompok politik tertentu. FIFA menegaskan, hanya mendengar dari PSSI, bukan organisasi politik dan Pemerintah. FIFA sama sekali tidak terpengaruh oleh sepak-terjang dari 'politisi sepakbola' Indonesia.

Nurdin Halid menambahkan bahwa bukan soal tidak mau mundur, tapi semua harus berjalan dalam sistem dan mekanisme hirarki organisasi sepakbola. Semua harus berada dalam alam demokrasi sepakbola di bawah payung FIFA. *"Di bawah payung FIFA, PSSI bersifat otonom dan kedudukan ketua umum ditentukan oleh anggota PSSI, bukan pemerintah, bukan KONI, dan juga bukan FIFA," tegas Nurdin.*

Yang harus didengar menurut Nurdin Halid adalah anggota PSSI. Bukan teriakan orang, opini dan pemberitaan pers, bukan juga demonstrasi. *"Memutuskan mundur berarti saya penakut dan tidak bertanggung jawab atas organisasi yang diguncangkan pihak lain. Nah, kalau saya mengikuti tekanan yang tak memiliki legalitas organisasi itu, maka saya adalah seorang penakut. Dan ini akan*

menjadi preseden buruk bagi PSSI di masa datang," demikian argumentasi Nurdin Halid saat itu.

Menurut Nurdin Halid, terlepas apakah benar dirinya bersalah atau dipersalahkan dalam kasus-kasus hukum yang menyimpannya, itu ada mekanismenya sendiri. Di sisi lain, sebagai pimpinan organisasi PSSI, dia harus bertahan demi menjaga harga diri (marwah) organisasi. Terkait keteguhan Nurdin Halid itu, Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Bakrie pernah menuturkan: "Jangan coba-coba mengganggu organisasi yang dipimpinnya. Sedikit saja ada orang yang mengganggu organisasi, ia langsung bereaksi."

Nurdin Halid menyesalkan pemberitaan negatif yang luar biasa dahsyat, yang melewati batas. Nurdin Halid pun mempertanyakan mengapa PSSI sebagai organisasi olahraga dibuat seperti organisasi politik. Padahal, PSSI telah berkali-kali menjelaskan kepada publik lewat pers mekanisme organisasi PSSI – AFC – FIFA dengan sangat terbuka dan transparan; namun opini yang diciptakan pers tetap saja terbalik.

Nurdin Halid menegaskan bahwa dirinya mundur ketika para anggota PSSI menyatakan bahwa Nurdin Halid harus mundur. Namun, pada saat itu, tidak satu pun surat secara resmi organisatoris dari para pemilik PSSI yang memiliki hak suara memintanya untuk mundur. Nurdin Halid pun berujar:

"Para anggota PSSI tetap mendukung saya karena mereka percaya sistem dan terobosan-terobosan yang saya lakukan telah mengangkat mutu sepakbola Nasional. Di sisi lain, mereka juga memahami bahwa kasus-kasus hukum yang menimpa saya, termasuk desakan agar saya mundur dari PSSI, adalah upaya pihak lawan politik maupun bisnis (koperasi) mematikan kepemimpinan dan karir saya di koperasi, sepakbola, dan politik."



"Ikut bidding Piala Dunia 2022 adalah mimpi bangsa besar ini. Bukan mimpi PSSI. Bukan mimpi Nurdin Halid. Atau Kang Nugraha Besoes. Saya katakan di sini bahwa orang termiskin di dunia adalah mereka yang sudah tidak mampu bermimpi lagi." Adhyaksa Dault, Menpora RI 2004-2009).

JEGAL HOSTPIALA DUNIA 2022 NURDIN DIADILI DI KSN MALANG


Berbagai upaya dilakukan pemegang kekuasaan saat itu untuk menjegal langkah Nurdin Halid di PSSI. Salah satu sasaran strategis yang dibidik ialah

menggagalkan pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Langkah blunder ini benar-benar dilakukan pemerintahan SBY melalui Menpora Andi Mallarangeng. Padahal, pencalonan Indonesia justru didukung oleh pemerintahan SBY era Menpora Adhyaksa Dault melalui surat resmi Pemerintah RI kepada FIFA yang ditandatangani oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie. Keputusan ini sungguh mencoreng wajah Indonesia di mata dunia.

Pada waktu hampir bersamaan, pemerintah berupaya 'menjatuhkan' Nurdin Halid melalui 'pengadilan liar' dalam arena Kongres Sepakbola Nasional (KSN), Maret 2010, di Malang. KSN merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden SBY agar PWI memelopori evaluasi perkembangan sepakbola nasional. Faktanya kemudian, KSN digelar oleh pemerintah melalui Menpora Andi Mallarangeng bersama KONI Pusat.

Selama dua hari penyelenggaraan KSN, bukan evaluasi yang terjadi, justru mengadili kepemimpinan PSSI di bawah komando Nurdin Halid. Namun, ambisi pemerintah menjatuhkan Nurdin lewat KSN gagal total berkat pimpinan KSN Agum Gumelar yang bersikap tegas dan netral.

Agum bahkan dengan tegas menolak rekomendasi pembentukan Badan Sepakbola Nasional (BSN) di bawah Menpora yang identik dengan 'pengawas' PSSI, sesuatu yang tabu menurut Statuta FIFA. Di mata Agum, kepemimpinan Nurdin Halid - yang sudah dikenalnya sejak di Makassar saat menjadi Pangdam Wirabuana - di PSSI berada di jalur yang benar untuk mengangkat mutu sepakbola NKRI.


**COORDINATING MINISTER FOR PEOPLE'S WELFARE
REPUBLIC OF INDONESIA**


No. : B. 105 /MENKO/KESRA/V/2009
Date : Jakarta, May 30 , 2009
To : Mr Joseph S. Blatter,
President of the Federation International Football Association (FIFA)

Subject : Supporting Letter for Host of FIFA World Cup 2022

Dear Mr. President

On behalf of the Government of Indonesia, we hereby confirm that the Government of Indonesia very much welcomes and supports the possibility that FIFA Confederations Cup 2021 and the 2022 FIFA World Cup may be staged in Indonesia. Therefore, The Government very much welcomes and supports the possible appointment by FIFA of the Local Organizing Committee ("LOC") to stage and host the Competitions.

The Government will adopt all measures and enact all necessary law, ordinances or regulations which may be required, in order to ensure compliance until not later than 1 June 2013.

Government of Indonesia

Aburizal Bakrie
Coordinating Minister for People's Welfare

Surat Dukungan Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia 2022 dari Menkokesra, Aburizal Bakrie.

KASAD MAJU DI KONGRES PEMERINTAH BEKUKAN PSSI

Kegagalan demi kegagalan benar-benar membuat pemerintah dan lawan-lawan politik terus mencari cara. Nurdin Halid terlalu kuat untuk ditaklukkan. Padahal, modal utama Nurdin Halid cuma satu: bekerja total dan ikhlas untuk kepentingan orang banyak.

Tak ingin dipermalukan lagi, kali ini jurus yang dipakai tidak main-main. Menjelang Kongres PSSI tahun 2011, setidaknya ada tiga jurus serang yang dilancarkan. Pertama, Nurdin Halid dituduh melakukan politisasi sepakbola ketika Tim Nasional dijamu makan malam oleh Aburizal Bakrie. Pers yang sudah lama 'dipakai' untuk menyerang Nurdin kali ini kembali menemukan momentum. Serangan oleh pers diikuti demonstrasi ke Kantor PSSI, Senayan.



George Toisutta dan Arifin Panigoro

Jurus kedua, menggalang kekuatan untuk menolak pencalonan kembali Nurdin Halid dalam Kongres PSSI 2011. Senjata yang dipakai ialah pasal kriminal dalam Statuta FIFA yang melarang mantan narapidana menjadi ketua umum federasi sepakbola. Protes yang digalang oleh KONI ini dijawab oleh FIFA bahwa sejauh hukum di sebuah negara memperbolehkan mantan narapidana memimpin organisasi, maka hal itu bukan masalah bagi FIFA. Hukum positif di Indonesia memperbolehkan seorang mantan narapidana memimpin asalkan tuntutan hukumnya tidak lebih dari lima tahun. Nurdin sendiri pernah dituntut empat tahun penjara dan divonis 2,5 tahun.

Jurus ketiga, gagal menghalangi pencalonan Nurdin, pemerintah kemudian 'merestui' Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal George Toisutta maju dalam Kongres PSSI berpasangan dengan pengusaha nasional Arifin Panigoro untuk menantang duet Nurdin Halid-Nirwan Bakrie. Entah karena merasa bakal kalah, Kelompok 78 yang mengusung Toisutta-Panigoro kemudian membuat kisruh detik-detik menjelang Pembukaan Kongres PSSI di Pekanbaru. Kelompok 78 juga mencoba

menguasai arena Kongres berikutnya di Jakarta, namun Agum Gumelar yang ditunjuk FIFA memimpin Kongres berhasil menutup kongres sebelum kelompok 78 mengambil-alih Kongres.



Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie

Gagal mendudukkan Toisuta-Panigoro lewat Kongres I Pekanbaru dan Kongres II Jakarta, Pemerintah melalui Menpora Andi Mallarangeng kemudian mengeluarkan kartu 'As', yaitu menerbitkan surat pembekuan kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie. Untuk mengakhiri kemelut, FIFA kemudian melarang Nurdin Halid-Nirwan Bakrie maupun Toisuta-Panigoro untuk maju dalam Kongres PSSI III di Solo.

The screenshot shows a news article from the PSSI website dated Saturday, 27 March 2010. The headline is 'FIFA Umumkan Berakhirnya Bidding Indonesia'. The article text states that the International Football Federation (FIFA) has decided not to renew the bid for Indonesia to host the 2022 FIFA World Cup. It mentions that the decision was made by the FIFA Executive Committee (Exco) on March 19, 2010, in Zurich, Switzerland. The article also notes that the Indonesian Football Federation (PSSI) will continue to support the bid for the 2022 World Cup, but it is no longer an official bid. The article includes a section for 'STATUS SMART PSSI CARD' and a note that the decision is final and cannot be appealed.

Pemberitahuan FIFA mengenai pemberhentian Indonesia dari peserta *bidding* tuan rumah piala dunia 2022.

Pernyataan FIFA di situs FIFA (19/3/2010) soal berakhirnya *Bidding* Indonesia:

"To inform the Indonesian Bidding Committee that they have lost their right to bid to host the 2022 FIFA World Cup™ after adequate governmental guarantees were not provided by Indonesia by the relevant deadlines".